



## Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan

Wafa Khairunisa ✉, Universitas Pendidikan Indonesia

Ari Febrian, Politeknik STMI Jakarta

Dadang Sundawa, Universitas Pendidikan Indonesia

Rahmat, Universitas Pendidikan Indonesia

✉ [wafachachakhairunisa@upi.edu](mailto:wafachachakhairunisa@upi.edu)

**Abstract:** The aim of this research is to investigate the relationship between Citizenship Education (PKn) in developing the civility of Indonesian citizens in the era of digitalization. By utilizing qualitative research methods and literature reviews, this study highlights aspects of Civics, digital citizenship, and elements of digital citizenship. The data collection process used involves in-depth evaluation of Civics theory, digital citizenship, and elements of digital citizenship. The data analysis methods applied are data reduction, presentation and verification. The results of this research show that Civics plays an important role in shaping the personality of citizens who can adapt in the digital era. The concept of global citizenship and elements of digital citizenship provide a comprehensive basis for designing a Civics curriculum that is responsive to the demands of the times.

**Keywords:** Civility of Indonesian Citizens, Digitalization, Citizenship Education.

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki keterkaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam mengembangkan keadaban Warga Negara Indonesia di tengah era digitalisasi. Dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif dan tinjauan literatur, studi ini menyoroti aspek-aspek PKn, kewarganegaraan digital, dan unsur-unsur digital citizenship. Proses pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengevaluasi secara mendalam terhadap teori PKn, kewarganegaraan digital, dan unsur-unsur *digital citizenship*. Metode analisis data yang diterapkan yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKn memegang peran penting dalam membentuk kepribadian warga negara yang dapat beradaptasi di era digital. Konsep kewarganegaraan global dan unsur-unsur digital citizenship memberikan dasar yang komprehensif untuk merancang kurikulum PKn yang responsif terhadap tuntutan zaman.

**Kata kunci:** Keadaban Warga Negara Indonesia, Digitalisasi, Pendidikan Kewarganegaraan.

**Received** 11 Januari 2024; **Accepted** 20 Februari 2024; **Published** 25 Februari 2024

**Citation:** Khairunisa, W., Febrian A., Sundawa, D., & Rahmat. (2024). Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4 (01), 1-8.

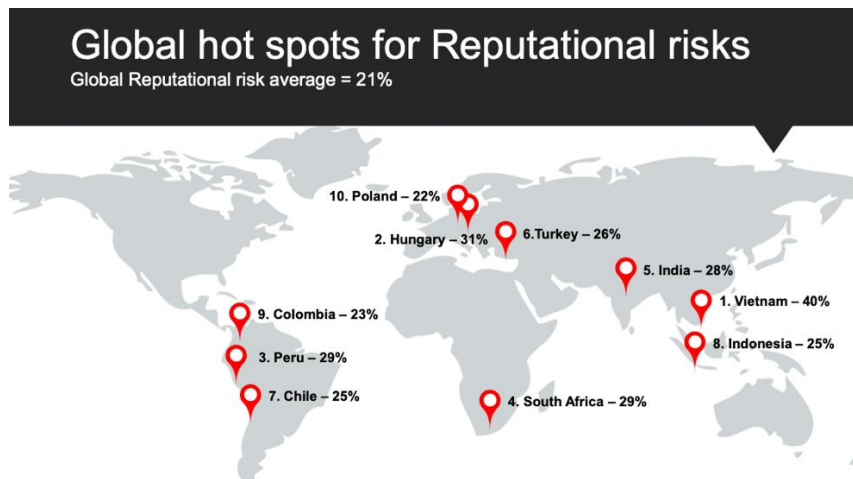


Copyright ©2024 Jurnal Jendela Pendidikan

Published by CV. Jendela Edukasi Indonesia. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi pada zaman ini memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam konteks penggunaan internet. Seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia, perlu disadari bahwa adopsi teknologi ini tidak selalu menghasilkan dampak positif terhadap perilaku masyarakat. Meskipun data menunjukkan peningkatan pengguna internet, laporan tahunan dari *Microsoft, Civil, Safety, and Interactions Online* pada tahun 2020 menyoroti beberapa aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. (Susanto & Budimansyah, 2022).



Gambar 1  
Ringkasan Negara dengan *Global Hots Spots for Reputational Risk* 2020  
Sumber: Microsoft 2020

Jika melihat data tersebut, tingginya persentase *hot spots global* di Indonesia dalam hal risiko reputasi menciptakan kebutuhan mendesak untuk membangun keadaban digitalisasi warga negara Indonesia. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tantangan reputasional tersebut dapat diatasi dengan penanaman pemahaman yang mendalam terkait etika digital, hak dan kewajiban, serta literasi digital. PKn dapat menjadi wadah efektif untuk membentuk karakter warga negara yang tidak hanya kompeten secara teknologi tetapi juga bertanggung jawab dalam interaksi online.

Pentingnya membangun keadaban digitalisasi melalui PKn tentu semakin meningkat seiring dengan munculnya *hot spots reputasional*. PKn dapat menjadi sarana untuk membekali generasi muda dengan keterampilan kritis dalam memahami dampak dari tindakan online mereka terhadap reputasi pribadi dan kolektif Indonesia. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep kewarganegaraan digital, PKn dapat memberikan landasan yang kokoh bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi secara positif dalam ruang digital global. Oleh karena itu, PKn tidak hanya berperan dalam mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab digital yang esensial untuk menjaga reputasi bangsa di era digital.

Dari adanya data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keadaban warganet Indonesia masih rendah. Literasi digital menjadi fokus kritis dalam mengatasi tantangan ini, bahkan keterampilan menggunakan media sosial masih belum terlaksana secara efektif (Febrian & Masyitoh, 2019). Meski Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai "Making Indonesia 4.0," dengan merevitalisasi sektor manufaktur melalui teknologi dan mendukung sektor pendidikan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kompetensi warga negara dalam menggunakan akses digital dengan baik.

Pendidikan diakui sebagai kunci untuk meningkatkan literasi digital untuk mencapai tujuan untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam era digital, peran pendidikan sangat vital untuk mempersiapkan individu agar dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk masa depan. Namun, penerapan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis teknologi sampai saat ini masih mengalami kendala, salah satunya adalah karena kurangnya fasilitas di sekolah atau kampus, serta adanya keterbatasan kompetensi pendidik.

Untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat, pendidikan kewarganegaraan dapat difokuskan pada peningkatan kualitas warga negara yang melibatkan aspek-aspek seperti pengembangan spiritual, tanggung jawab individual, dan pembentukan kepribadian yang reflektif. Konsep kewarganegaraan digital juga relevan, mencakup elemen-elemen seperti etika digital, akses digital, hukum digital, komunikasi digital, literasi digital, perdagangan digital, hak dan tanggung jawab digital, keamanan digital, serta kesehatan dan kesejahteraan digital. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, langkah-langkah konkret diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi memberikan dampak positif terhadap keadaban dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. (Wahyudi et al., 2020).

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait dapat menjadi kunci dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan kewarganegaraan digital yang efektif. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat lebih siap menghadapi perubahan digital dan memanfaatkannya secara positif untuk pembangunan bangsa yang lebih baik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi literatur untuk mendalami pemahaman tentang keberadaan digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dengan memilih pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan memahami kompleksitas fenomena sosial terkait penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan keberadaan digitalisasi Warga Negara Indonesia. Prosedur dalam penelitian ini yaitu meliputi: pertama memilih sumber pustaka, kedua menelusuri sumber pustaka, ketiga membaca sumber pustaka, keempat melakukan penyataan, dan terakhir penyajian kajian pustaka.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menerapkan teknik analisis data di antaranya: pertama adalah reduksi data, di mana informasi penting diekstraksi dan temuan-temuan yang saling terkait dikelompokkan untuk mengidentifikasi inti dari materi yang dihadapi. Kemudian, hasil reduksi data akan disajikan secara terstruktur melalui display data, baik dalam bentuk tabel, grafik, atau rangkaian temuan utama, guna memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang temuan yang dihasilkan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan, di mana kesimpulan atau temuan dari studi literatur dievaluasi dan diverifikasi melalui pendekatan triangulasi, dengan membandingkan temuan literatur dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan sumber data lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa temuan yang dihasilkan mencerminkan keberagaman pandangan dan pemahaman dari berbagai sumber literatur yang relevan (Sugiyono, 2020).

**HASIL PENELITIAN****TABEL 1. 9** *Elements of Digital Citiznship*

<b>NO</b>	<b>Elements</b>	<b>Desctiption</b>
<b>1</b>	<i>Digital Access</i>	<i>Full electronic participation on in society</i>
<b>2</b>	<i>Digital Commerce</i>	<i>Electronic buying and selling of goods</i>
<b>3</b>	<i>Digital Communication</i>	<i>Electronic exchange of information</i>
<b>4</b>	<i>Digital Literacy</i>	<i>Teaching and learning about technologyand its use</i>
<b>5</b>	<i>Digital Etiquette</i>	<i>Electronic standars of conduct or procedure</i>
<b>6</b>	<i>Digital Law</i>	<i>Electronic responsibility for actions and deeds</i>
<b>7</b>	<i>Digital Rights and Responsibilites</i>	<i>Those freedoms extended so everyone in a digital world</i>
<b>8</b>	<i>Digital Health and Wllness</i>	<i>Physical and psychological well-being in a digital world</i>
<b>9</b>	<i>Digital Security</i>	<i>Electronis precautions to guarantee safety</i>

*Digital citizenship* adalah konsep yang penting dalam era digital saat ini, dan Mike Ribble menyumbangkan pemahaman yang komprehensif tentang elemen-elemen yang membentuknya. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap elemen *digital citizenship* yang dikemukakan oleh Ribble:

1. *Digital Access* (Akses Digital)
  - Mengacu pada hak setiap individu untuk memiliki akses ke teknologi digital.
  - Menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan akses digital dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua.
2. *Digital Commerce* (E-commerce Digital)
  - Menyangkut pemahaman tentang konsep perdagangan elektronik dan keamanan transaksi online.
  - Melibatkan kesadaran terhadap risiko dan etika dalam aktivitas perdagangan digital.
3. *Digital Communication* (Komunikasi Digital)
  - Fokus pada kemampuan berkomunikasi secara efektif dan sopan dalam lingkungan digital.
  - Menekankan arti pentingnya komunikasi yang jelas dan penuh pengertian.
4. *Digital Literacy* (Literasi Digital)
  - Berkaitan dengan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dari berbagai sumber digital.
  - Menekankan pentingnya keterampilan literasi untuk menghindari penyebaran informasi palsu.
5. *Digital Etiquette* (Etika Digital)
  - Menyangkut perilaku yang baik dan sopan dalam interaksi online.
  - Termasuk norma-norma dan aturan perilaku yang dihormati dalam dunia digital.
6. *Digital Law* (Hukum Digital)
  - Berkaitan dengan pemahaman dan menghormati hukum yang berlaku di dunia digital.
  - Melibatkan pemahaman hak cipta, privasi online, dan aturan hukum lainnya.
7. *Digital Rights and Responsibility* (Hak dan Tanggung Jawab Digital)
  - Menekankan hak-hak individu dalam dunia digital dan tanggung jawab yang melekat pada penggunaan teknologi tersebut.
  - Melibatkan kesadaran tentang hak privasi dan kewajiban terhadap komunitas online.

8. *Digital Health and Wellness* (Kesehatan dan Kesejahteraan Digital)
  - Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline.
  - Berkaitan dengan kesadaran akan dampak kesehatan mental dan fisik dari penggunaan teknologi digital.
9. *Digital Security* (Keamanan Digital)
  - Berkaitan dengan tindakan untuk melindungi diri dari risiko dan ancaman di dunia digital.
  - Melibatkan pemahaman tentang keamanan data, perlindungan dari cyberbullying, dan praktik keselamatan online lainnya.

Sembilan elemen ini membentuk landasan untuk membimbing individu menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan paham akan implikasi etika dalam menggunakan teknologi. Penggunaan elemen ini dalam kebijakan pendidikan di berbagai negara, termasuk Kanada, mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan pemahaman digital citizenship dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat atas (Susanto & Budimansyah, 2022).

## PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan Digital memiliki peran krusial dalam membentuk generasi muda yang terlibat secara aktif dalam komunitas online. Fokus utama dari pendekatan ini adalah mengembangkan kemampuan remaja untuk melakukan konsumsi informasi online secara kritis dan bertanggung jawab. Tujuan ini sejalan dengan perubahan paradigma dalam kehidupan digital, di mana remaja tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga berperan sebagai produsen dan kontributor konten dalam lingkungan daring (Hamadi & Hamidulloh, 2020).

Dengan memahami bagaimana memilah dan mengevaluasi informasi secara cermat, warga negara muda dapat menghindari disinformasi dan kontribusi negatif dalam ranah online. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan Digital juga bertujuan melibatkan mereka dalam diskusi sosial dan politik online yang positif. Ini mencakup pengembangan keterampilan berkomunikasi secara efektif, pemahaman terhadap keragaman pendapat, serta kesadaran akan dampak perilaku online terhadap masyarakat secara umum. Dengan demikian, pendidikan ini bukan hanya tentang literasi digital, tetapi juga membentuk etika, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam dunia maya.

Untuk memahami konsep kewarganegaraan digital, maka perlu merujuk pada konsep kewarganegaraan secara umum. Kewarganegaraan tradisional dikaitkan dengan keanggotaan dalam suatu komunitas sosial, politik, atau nasional yang membawa hak dan tanggung jawab. Kewarganegaraan digital memperluas konsep ini dengan mempertimbangkan bagaimana individu bertindak sebagai anggota komunitas online, mencakup interaksi dengan tetangga atau individu di berbagai belahan dunia melalui teknologi. Definisi kewarganegaraan digital mencakup norma perilaku online yang pantas dan bertanggung jawab serta kebiasaan dan tindakan yang memengaruhi ekologi konten digital dan komunitas online (Digdoyo, 2018).

Dalam bidang pendidikan, pendidikan karakter berbasis digital dapat disatukan dengan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan tujuan membentuk karakter warga negara agar siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Integrasi ini mencakup penerapan konsep digital citizenship ke dalam kurikulum, memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memahami prinsip-prinsip teoritis kewarganegaraan digital, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Upaya pendidikan ini tentu harus melibatkan habituasi di beberapa lingkungan, di mana pembiasaan karakter dan watak kewarganegaraan menjadi fokus utama. Dengan pendekatan ini, warga negara tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai etika

digital, hak dan kewajiban online, literasi digital, dan aspek-aspek kewarganegaraan digital lainnya, tetapi juga terlibat secara aktif dalam praktik sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi landasan penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki pemahaman teoritis yang kuat, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kewarganegaraan digital dalam kehidupan mereka, sehingga dapat menjadi warga negara yang berkontribusi positif dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi (Suprayitno & Wahyudi, 2020).

*Element digital citizenship* yang diusulkan oleh Ribble, yang mencakup *digital etiquette, digital access, digital law, digital communication, digital literacy, digital commerce, digital rights and responsibility, digital safety and security*, serta *digital health and wellness*, memberikan suatu kerangka yang komprehensif untuk memahami kewarganegaraan digital. Kesembilan elemen tersebut menjadi landasan dalam merinci berbagai aspek dan tanggung jawab yang terkait dengan perilaku dan interaksi individu dalam lingkungan digital (Ayu et al., 2022).



Gambar 2.

*9 Elements of Digital Citizenship*

Sumber: <https://www.journeywithtechnology.com/prioritizing-the-nine-elements-of-digital-citizenship/>

Konsep *digital citizenship* ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga telah diaplikasikan di berbagai negara, termasuk Kanada, di mana elemen-elemen tersebut menjadi pondasi utama dalam pembentukan kebijakan pendidikan kewarganegaraan digital, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas. Penggunaan kerangka digital citizenship ini membantu menyusun panduan dan pedoman yang konkret bagi pendidikan di era digital.

Pentingnya elemen-elemen *digital citizenship* tersebut terletak pada kemampuannya untuk memberikan arah yang jelas terkait etika digital, hak dan kewajiban, keamanan online, literasi digital, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan penggunaan teknologi. Bagan yang disediakan memberikan gambaran visual yang memudahkan pemahaman mengenai pembagian dan keterkaitan antar elemen-elemen tersebut, menciptakan landasan yang kokoh untuk membangun pemahaman yang holistik dan praktis terkait kewarganegaraan digital di berbagai tingkatan pendidikan. Dengan demikian, elemen-elemen digital citizenship tersebut bukan hanya menjadi konsep tetapi juga menjadi pedoman implementatif yang dapat diadopsi dalam merancang program pendidikan kewarganegaraan digital di berbagai konteks pendidikan.

Secara tidak langsung, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi wadah efektif untuk menyelaraskan elemen-elemen digital citizenship dengan konteks kehidupan warga

negara Indonesia. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, konsep-konsep tersebut diintegrasikan secara holistik, memandu peserta didik dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika, literasi, dan keamanan digital. Dengan demikian, pembangunan keadaban digitalisasi warga negara Indonesia tidak hanya terfokus pada penguasaan teknologi semata, melainkan juga melibatkan pembentukan karakter dan kesadaran warga negara yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik dan positif.

Maka, dalam membangun keadaban digitalisasi warga negara Indonesia melalui perspektif Pendidikan Kewarganegaraan perlu melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, integrasi materi kewarganegaraan digital ke dalam kurikulum PKn, dengan penekanan pada aspek-aspek seperti etika digital, hak dan kewajiban online, literasi digital, serta keamanan dan kesehatan digital. Pembelajaran ini harus mencakup pemahaman tentang bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Kedua, pendidikan kewarganegaraan digital perlu mendorong partisipasi aktif warga negara dalam ranah digital. Ini melibatkan pelatihan keterampilan untuk mengonsumsi informasi online secara kritis, berpartisipasi dalam diskusi online yang positif, dan memahami dampak dari tindakan online terhadap masyarakat. Langkah ini akan membantu membangun warga negara yang bertanggung jawab dan cerdas dalam menggunakan teknologi.

Ketiga, pendidikan ini harus mengajarkan tentang pentingnya keadilan, toleransi, dan kesetaraan dalam lingkungan digital. Hal ini mencakup pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan pandangan dalam ranah online. Integrasi nilai-nilai ini akan menciptakan warga negara yang responsif dan menghormati diversitas di dunia maya.

Terakhir, evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas program pendidikan kewarganegaraan digital. Penyesuaian dan perbaikan terus-menerus akan memastikan bahwa program tersebut relevan dengan perkembangan teknologi dan mampu mencetak generasi muda Indonesia yang mampu menghadapi tantangan digital dengan bijaksana.

Dengan demikian, Indonesia dapat menghasilkan warga negara yang tidak hanya unggul secara teknologi tetapi juga beretika dalam menjalani kehidupan di dunia maya. Melalui upaya bersama dalam pendidikan kewarganegaraan digital, kita dapat membentuk masyarakat yang mampu menghadapi tantangan digital dengan bijaksana dan menciptakan dampak positif pada keadaban Indonesia secara keseluruhan.

Selain itu, adanya pendidikan kewarganegaraan digital juga bukan hanya sekadar respons terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga sebuah komitmen untuk membentuk individu yang dapat secara positif berkontribusi dalam masyarakat digital global. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan terus-menerus, seorang pendidik dapat membekali generasi penerus dengan pemahaman yang mendalam tentang implikasi teknologi terhadap kehidupan sehari-hari, memberikan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dengan bijaksana dalam dunia maya, dan menanamkan nilai-nilai fundamental kewarganegaraan. Sehingga, Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga dikenal sebagai masyarakat yang beretika dan responsif terhadap perubahan, menjaga harmoni dalam keberagaman budaya, serta mempromosikan keadilan dan perdamaian di tengah dinamika era digital.

## **SIMPULAN**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas, terutama dalam menghadapi era digital. Fokusnya tak hanya pada nilai-nilai kewarganegaraan, tetapi juga pada karakter dan identitas yang berkontribusi positif. PKn harus mengadaptasi konsep global citizenship agar warga negara mampu bersaing dalam dunia digital. Pendidikan kewarganegaraan digital menjadi kunci untuk membentuk generasi muda yang aktif dalam dunia digitalisasi, mengembangkan kemampuan memilih informasi secara kritis. Integrasi 9 elemen digital citizenship dapat membantu membentuk karakter warga negara yang siap menghadapi

revolusi industri 4.0. Melalui pendidikan kewarganegaraan digital, kita dapat membangun keadaban digitalisasi warga negara Indonesia, khususnya dalam mempersiapkan Warga Negara Indonesia untuk bersikap tanggap dan bertanggung jawab dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ayu, D., Mursal, M., Jianti, Witro, D., & Nurdiansyah, R. (2022). A Sociological Approach to Consumer Protection in E-Commerce Transactions During the Covid-19 Pandemic. *Khazanah Hukum*, 4(3), 181–191.
2. Digdoyo, E. (2018). Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, No. 1, 3(1), 42–59.
3. Febrian, A., & Masyitoh, I. (2019). Strengthening Civic Literacy through Media Literacy in Jabar Saber Hoaks. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 79–83.
4. Hamadi, F., & Hamidulloh, I. (2020). *Konsep dan aplikasi literasi baru di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0* (Pertama). CV. Pilar Nusantara.
5. Khairunisa, W., & Damayanti, S. (2023). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Suatu Negara pada Generasi Milenial Abad-21. *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(1).
6. Marsudi, K. (2020). *Framework Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Abad 21*. UNY Press.
7. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Alfabeta.
8. Suprayitno, A., & Wahyudi, W. (2020). *Pendidikan Karakter di Era Milenial*. Deepublish.
9. Susanto, E., & Budimansyah, D. (2022). Membangun keadaban digital warganet Indonesia dalam perspektif kewarganegaraan digital. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 15–24.
10. Wahyudi, A., Setiawan, D., & Jamaludin. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Moral dan Karakter*. CV. AA Rizky.

## PROFIL SINGKAT

**Wafa Khairunisa** adalah mahasiswa jenjang S2 program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Ia merupakan pendidik dari SMP Plus Al Aqsha dan aktif membantu dosen dalam proyek penelitian pada bidang pengembangan pembelajaran.

**Ari Febrian** adalah seorang Asisten Ahli di Politeknik STMI Jakarta dan aktif menulis buku di beberapa penerbit swasta.

**Dadang Sundawa** adalah guru besar pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.

**Rahmat** adalah guru besar pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.